POHON KINERJA PERIODE 2025 - 2030

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KINERJA STRATEGIS

"Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."

"Meningkatnya kapasitas desa melalui pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa."

KINERJA URUSAN

"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa."

- "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa."
  - "Meningkatnya kualitas penataan desa."
    - "Terlaksananya fasilitasi penataan desa."
      - 1. Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi.
      - 2. Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat.
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa.
      - 4. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa.
  - "Meningkatnya efektivitas kerja sama desa."
    - "Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa."
      - 1 . Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota.
      - 2. Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga.
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
  - "Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa."
    - "Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang - undangan."
      - 1. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/ Walikota Yang Mengatur Desa.
      - 2. Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
      - 4. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Desa.
      - 5. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
      - 6. Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
      - 7. Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
      - 8. Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan.
      - 9. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa Dan Kelurahan.
      - 10. Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.
      - 11. Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota Bpd.
      - 12. Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan Dan Bantuan Teknis.
      - 13. Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Penetapan Peraturan Bum Desa Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa.
      - 14. Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
      - 15. Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data Dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa Di Kabupaten/Kota.
- "Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa."
  - "Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan."
    - "Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa."
      - 1. Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.
      - 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat.
      - 3. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
      - 4. Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
      - 5. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dan Desa.
      - 6. Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak Pkk Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Keluarga.
- "Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah."
  - "Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah."
    - "Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah."
      - 1. Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah.
      - 2. Tersedianya Dokumen Rka - Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka - Skpd.
      - 3. Tersedianya Dokumen Dpa - Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa - Skpd.
      - 4. Tersedianya Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd.
      - 5. Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd.
      - 6. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - "Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah."
      - 1. Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Asn.
      - 2. Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Skpd.
      - 3. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd.
      - 4. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd.
    - "Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah."
      - 1. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd.
      - 2. Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd.
      - 3. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd.
    - "Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah."
      - 1. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
      - 2. Terlaksananya Penatausaan Dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian.
      - 3. Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.
      - 4. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan.
      - 5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
    - "Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah."
      - 1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
      - 2. Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.
      - 3. Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan.
      - 4. Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan.
      - 5. Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu.
      - 6. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd.
      - 7. Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd.
      - 8. Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd.
    - "Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah."
      - 1. Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.
      - 2. Tersedianya Mebel.
      - 3. Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya.
      - 4. Tersedianya Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.
      - 5. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan.
    - "Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"
      - 1. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
      - 2. Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik.
      - 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
    - "Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"
      - 1. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.
      - 2. Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya.
      - 3. Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.
      - 4. Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

KINERJA TAKTIKAL

KINERJA OPERASIONAL